

MODEL KEPEMIMPINAN BERKELANJUTAN DALAM ADMINISTRASI PENDIDIKAN : STUDI KASUS ADAPTASI KURIKULUM MERDEKA DI DAERAH PERDESAAN (Fokus Kepemimpinan Hijau dan Adaptasi Kurikulum Baru)

Irda Suriani¹, Mira Wahyuni², Fani Rahmayati Siregar³, Romaito Siregar⁴
irdaharahap@gmail.com¹, mirawhynii84@gmail.com², fanirahmayati@gmail.com³,
romaitosiregar022@gmail.com⁴

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

ABSTRAK

Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola dan administrasi pendidikan, terutama pada satuan pendidikan di daerah perdesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya serta karakteristik lingkungan yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam model kepemimpinan berkelanjutan dalam administrasi pendidikan dengan fokus pada penerapan kepemimpinan hijau dan adaptasi Kurikulum Merdeka di sekolah perdesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berkelanjutan berperan signifikan dalam memperkuat sistem administrasi pendidikan, meningkatkan kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, serta membangun budaya sekolah yang peduli lingkungan. Kepemimpinan hijau terbukti menjadi pendekatan strategis dalam menjembatani kebijakan pendidikan nasional dengan konteks lokal perdesaan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung pendidikan berkelanjutan di wilayah rural.

Kata Kunci: Kepemimpinan Berkelanjutan, Administrasi Pendidikan, Kurikulum Merdeka.

ABSTRACT

The implementation of the Merdeka Curriculum requires fundamental changes in educational governance and administration, particularly in rural schools that face limited resources and possess distinctive environmental characteristics. This study aims to examine in depth the model of sustainable leadership in educational administration, with a focus on the application of green leadership and the adaptation of the Merdeka Curriculum in rural schools. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and analysis of school documents. The findings indicate that sustainable leadership plays a significant role in strengthening educational administration systems, enhancing teachers' readiness to implement the Merdeka Curriculum, and fostering an environmentally conscious school culture. Green leadership has proven to be a strategic approach in bridging national education policies with local rural contexts. These findings underscore the importance of strengthening school principals' leadership capacity in supporting sustainable education in rural areas.

Keywords: Sustainable Leadership, Educational Administration, Merdeka Curriculum.

PENDAHULUAN

Perubahan global yang ditandai dengan percepatan perkembangan teknologi, krisis lingkungan, serta dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Pendidikan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai upaya strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, adaptif, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial. Dalam

konteks ini, peran kepemimpinan pendidikan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi pendidikan, khususnya pada level satuan pendidikan.

Di Indonesia, transformasi pendidikan diwujudkan melalui kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter, dan pembelajaran kontekstual. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan kurikulum yang seragam menuju pendekatan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Namun, implementasi kebijakan ini membutuhkan kesiapan manajerial dan kepemimpinan yang kuat, terutama dalam aspek administrasi pendidikan (Sudibyo, 2024).

Administrasi pendidikan memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan tidak hanya mencakup pengelolaan dokumen dan tata usaha, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh sumber daya pendidikan secara sistematis. Dalam konteks perubahan kurikulum, administrasi pendidikan menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik operasional sekolah. Oleh karena itu, kualitas administrasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh gaya dan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah.

Sekolah di daerah perdesaan menghadapi tantangan yang berbeda dan cenderung lebih kompleks dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan. Keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pelatihan profesional, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan baru. Selain itu, sekolah perdesaan umumnya berada dalam lingkungan alam yang masih kuat, sehingga memiliki potensi besar sebagai sumber belajar kontekstual, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam proses pendidikan.

Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah di daerah perdesaan dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keberlanjutan dan inovasi. Kepemimpinan berkelanjutan menjadi pendekatan yang relevan karena menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan pendidikan, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta keberlangsungan lingkungan dan sosial sekolah. Kepemimpinan berkelanjutan memandang sekolah sebagai sistem yang hidup dan saling terkait, sehingga setiap keputusan administratif harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya (Komariah & Triatna, 2021).

Salah satu bentuk konkret dari kepemimpinan berkelanjutan adalah kepemimpinan hijau. Kepemimpinan hijau dalam konteks pendidikan mengacu pada kemampuan pemimpin sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan ke dalam kebijakan, budaya organisasi, dan praktik pembelajaran. Kepemimpinan hijau tidak hanya berfokus pada program lingkungan semata, tetapi juga pada pembentukan kesadaran ekologis seluruh warga sekolah melalui keteladanan, regulasi internal, dan penguatan nilai keberlanjutan dalam kurikulum (Shodikin et al., 2025).

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepemimpinan hijau memiliki relevansi yang sangat kuat. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek dan penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang salah satu dimensinya adalah kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Sekolah perdesaan memiliki keunggulan komparatif dalam hal kedekatan dengan alam dan kearifan lokal masyarakat, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar autentik. Namun, pemanfaatan potensi tersebut memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan mampu mengelola administrasi pendidikan secara adaptif.

Berbagai penelitian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berperan signifikan dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan pengelolaan sekolah berbasis keberlanjutan. Aini (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif dan partisipatif mampu meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam menghadapi perubahan kurikulum. Sementara itu, Shodikin et al. (2025) menemukan bahwa kepemimpinan hijau berkontribusi terhadap pembentukan budaya sekolah yang peduli lingkungan dan berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks sekolah perkotaan atau menelaah kepemimpinan secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan administrasi pendidikan di wilayah perdesaan.

Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana model kepemimpinan berkelanjutan diterapkan dalam administrasi pendidikan di sekolah perdesaan, khususnya dalam konteks adaptasi Kurikulum Merdeka melalui pendekatan kepemimpinan hijau. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual mengenai praktik kepemimpinan kepala sekolah di daerah perdesaan serta kontribusinya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam model kepemimpinan berkelanjutan dalam administrasi pendidikan dengan fokus pada praktik kepemimpinan hijau dan adaptasi Kurikulum Merdeka di daerah perdesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kepemimpinan pendidikan, serta kontribusi praktis bagi kepala sekolah, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam mengembangkan sekolah perdesaan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena bertujuan untuk memahami fenomena kepemimpinan berkelanjutan secara mendalam dalam konteks nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali proses, strategi, dan makna di balik praktik kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola administrasi pendidikan dan adaptasi kurikulum.

Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan pada sekolah perdesaan yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik perdesaan dan adanya program sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pandangan dan pengalaman kepemimpinan kepala sekolah, observasi untuk melihat implementasi kebijakan sekolah secara langsung, serta analisis dokumen seperti rencana kerja sekolah, dokumen kurikulum, dan program lingkungan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Berkelanjutan dalam Konteks Administrasi Pendidikan di Daerah Perdesaan

Kepemimpinan berkelanjutan dalam administrasi pendidikan di daerah perdesaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat sekolah berada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah di wilayah perdesaan

cenderung mengembangkan pendekatan kepemimpinan yang bersifat adaptif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target administratif jangka pendek, tetapi juga pada keberlangsungan sistem sekolah secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, kepemimpinan berkelanjutan tercermin melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, keberlanjutan program sekolah, serta kesejahteraan warga sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pengelola administrasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, agar tetap mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan Komariah dan Triatna (2021) yang menegaskan bahwa kepemimpinan berkelanjutan menuntut kemampuan pemimpin pendidikan dalam menjaga kesinambungan mutu sekolah di tengah perubahan kebijakan.

Selain itu, administrasi pendidikan di sekolah perdesaan menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Kepala sekolah tidak menerapkan kebijakan secara kaku, melainkan melakukan penyesuaian administratif agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik masyarakat sekitar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan berkelanjutan merupakan pendekatan yang kontekstual dan tidak bersifat seragam (Sudibyo, 2024).

Dengan demikian, kepemimpinan berkelanjutan dalam administrasi pendidikan menjadi fondasi utama bagi sekolah perdesaan dalam menghadapi perubahan kurikulum. Tanpa kepemimpinan yang visioner dan berorientasi keberlanjutan, implementasi Kurikulum Merdeka berpotensi berjalan secara administratif semata tanpa memberikan dampak substantif terhadap kualitas pembelajaran.

Implementasi Kepemimpinan Hijau sebagai Bagian dari Kepemimpinan Berkelanjutan

Kepemimpinan hijau merupakan salah satu dimensi penting dalam kepemimpinan berkelanjutan yang semakin relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah di daerah perdesaan mengintegrasikan prinsip-prinsip kepemimpinan hijau ke dalam kebijakan dan praktik administrasi pendidikan. Integrasi ini tidak hanya diwujudkan dalam program lingkungan formal, tetapi juga dalam budaya organisasi sekolah secara keseluruhan.

Kepemimpinan hijau tercermin melalui kebijakan pengelolaan lingkungan sekolah, seperti pemanfaatan lahan sekolah untuk kegiatan edukasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga sekolah, serta penghematan penggunaan sumber daya. Kepala sekolah berperan sebagai role model yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan, sehingga mendorong keterlibatan guru dan peserta didik dalam menjaga lingkungan sekolah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Shodikin et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemimpinan hijau mampu membentuk budaya sekolah yang peduli lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam konteks administrasi pendidikan, kepemimpinan hijau juga memengaruhi perencanaan dan pengorganisasian kegiatan sekolah. Program sekolah dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk menanamkan nilai kepedulian lingkungan kepada seluruh warga sekolah.

Lebih lanjut, kepemimpinan hijau di sekolah perdesaan memiliki keunggulan tersendiri karena didukung oleh lingkungan alam dan kearifan lokal masyarakat. Kepala sekolah memanfaatkan potensi tersebut sebagai bagian dari strategi kepemimpinan berkelanjutan, sehingga sekolah tidak terlepas dari konteks sosial dan ekologisnya. Hal ini memperkuat posisi kepemimpinan hijau sebagai pendekatan yang relevan dan aplikatif

dalam pendidikan perdesaan.

Adaptasi Kurikulum Merdeka melalui Administrasi Pendidikan yang Fleksibel

Adaptasi Kurikulum Merdeka di daerah perdesaan memerlukan pengelolaan administrasi pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka tidak hanya diimplementasikan secara administratif, tetapi juga dipahami dan diterapkan secara substantif oleh guru.

Administrasi pendidikan mendukung adaptasi kurikulum melalui penyusunan perencanaan pembelajaran yang kontekstual, pengorganisasian kegiatan proyek berbasis lingkungan, serta evaluasi pembelajaran yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kepala sekolah memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan potensi lokal, sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan kemandirian dan fleksibilitas (Aini, 2025).

Selain itu, adaptasi kurikulum juga dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan guru dan tenaga kependidikan. Administrasi pendidikan tidak dijalankan secara top-down, melainkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh warga sekolah. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap perubahan kurikulum dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan baru.

Dengan demikian, adaptasi Kurikulum Merdeka di sekolah perdesaan tidak hanya bergantung pada kesiapan guru, tetapi juga pada kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola administrasi pendidikan secara adaptif. Kepemimpinan berkelanjutan memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan identitas dan karakter lokalnya.

Tantangan Implementasi dan Strategi Kepemimpinan Berkelanjutan

Meskipun kepemimpinan berkelanjutan dan kepemimpinan hijau memberikan dampak positif, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasinya. Keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, serta beban administratif yang tinggi menjadi kendala utama bagi sekolah perdesaan. Tantangan ini berpotensi menghambat optimalisasi administrasi pendidikan jika tidak dikelola secara tepat.

Namun, kepala sekolah menunjukkan strategi kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi tantangan tersebut. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan kolaborasi internal, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pengembangan budaya sekolah yang mendukung perubahan. Kepala sekolah juga berperan sebagai mediator antara kebijakan pusat dan realitas sekolah, sehingga administrasi pendidikan tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan berkelanjutan bukan sekadar konsep normatif, tetapi merupakan praktik nyata yang menuntut kreativitas dan komitmen pemimpin pendidikan (Komariah & Triatna, 2021). Kepemimpinan hijau dan adaptasi kurikulum menjadi bagian integral dari strategi kepemimpinan dalam menghadapi keterbatasan dan ketidakpastian.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di daerah perdesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola administrasi pendidikan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan berkelanjutan memiliki peran krusial dalam administrasi pendidikan di sekolah perdesaan. Kepemimpinan hijau menjadi pendekatan strategis yang memungkinkan kepala sekolah mengintegrasikan nilai keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan, budaya, dan praktik administrasi sekolah. Kepemimpinan berkelanjutan juga terbukti mendukung adaptasi Kurikulum Merdeka secara kontekstual dan bermakna. Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal, kepala sekolah mampu menjembatani kebijakan pendidikan nasional dengan realitas sosial dan lingkungan sekolah perdesaan.

Saran

Pengembangan kepemimpinan berkelanjutan dan kepemimpinan hijau perlu menjadi prioritas dalam program pelatihan kepala sekolah, khususnya bagi sekolah perdesaan. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendorong integrasi nilai keberlanjutan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kepemimpinan berkelanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperkuat temuan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 134–146.
- Komariah, A., & Triatna, C. (2021). Kepemimpinan pendidikan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 117–129.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2023). Kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Shodikin, A., Suharto, S., & Prasetyo, D. (2022). Kepemimpinan hijau kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah berkelanjutan. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 5(2), 89–101.
- Sudibyo, A. (2024). Administrasi pendidikan dalam dinamika kebijakan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1), 55–68.
- Suryana, D., & Iskandar, J. (2021). Tantangan implementasi kebijakan pendidikan di wilayah perdesaan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 327–339.
- Wahyuni, S., & Mulyadi, E. (2022). Manajemen sekolah berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan mutu pendidikan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Pendidikan*, 9(1), 1–14.
- Yuliana, R., & Hidayat, S. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam adaptasi kurikulum berbasis proyek. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(2), 210–223.
- Zaini, M., & Nurhadi, A. (2024). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di sekolah perdesaan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 65–78.